LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Dengan Mengucapkan Puji Syukur sebagai bagian perwujudan Imaniah atau anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa , sehingga Laporan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025 dapat dibuat.

Isi Laporan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong ini merupakan Laporan Akhir Tahun (Januari s/d 31 Desember 2025) berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) Penatausahaan.

Harapan kami semoga Laporan Tahunan ini sesuai dengan yang diinginkan dan dapat memberi manfaat positif dan memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.

Tanjung, 5 Juni 2026
Pengguna Anggaran,

DIYANTO, SE, MT, FRMP
Pembina Tk.I
NIP. 19110132005011005

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2025
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah bahwa setelah berakhirnya tahun anggaran Kepala Daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang bersangkutan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Adapun maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan selama tahun anggaran 2025, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipecayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Sebagai bentuk transparansi laporan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun jujur kepada masyarakat secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.
c. Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pada Inspektorat Daerah.
d. Sebagai bentuk ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan daerah.
e. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
f. Secara manajemen membantu para pengguna keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam pengelolaan dan

pengendalian atas asset , kewajiban dan akuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

g. Laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk tahun anggaran selanjutnya.
h. Sebagai bahan indikasi apakah sumber daya yang diperoleh telah digunakan sesuai dengan anggaran dan apakah sumber daya tersebut sudah digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan.
i. Keseimbangan antar generasi yaitu untuk membantu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah pada periode laporan apakah anggaran yang disediakan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang telah dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan disusunnya laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan keputusan ekonomi, sosila maupun politik.
b. Untuk mengetahui seberapa besar belanja daerah selama tahun anggaran 2025 yang didanai sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
c. Untuk menyajikan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang telah dipergunakan dalam pemerintah daerah.
d. Untuk mengetahui posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami penurunan atau kenaikan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
e. Untuk menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pada Inspektorat Daerah, baik yang menyangkut Asset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Pendapatan maupun belanja yang telah dikeluarkan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang telah dilakukan selama periode pelaporan.
f. Bagi pengguna laporan, laporan keuangan yang disajikan dapat menjadi bahan informasi/masukan untuk pengambilan keputusan /kebijakan pada pelaksanaan tahun anggaran selanjutnya.
g. Bagi masyarakat, laporan keuangan yang disajikan bisa menjadi bahan informasi tentang sejauh mana upaya pemerintah dalam melaksanakan amanah yang telah

diberikan, apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi kebutuhan mereka baik dalam hal pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan maupun lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

LKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
30. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 86);
31. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 87);
32. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 36);

33. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 55);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
35. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2;
37. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26).

1.3. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

BAB. I Pendahuluan .....

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....

1.3. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan.....

BAB.II Pencapaian Target Kinerja SKPD .....

2.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD .....

BAB. III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....

BAB. IV Kebijakan Akuntansi.....

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....

4.3 Kebijakan Akuntansi .....

BAB. V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca .....

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional .....

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....

BAB.VI Penjelasan Atas Informai-Informasi Non Keuangan SKPD .....

BAB VII Penutup .....

BAB. II
PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Inspektorat Kabupaten Tabalong melalui APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran belanja Daerah sebesar Rp. 26.635.536.080,- dengan rincian belanja Operasional sebesar Rp. 26.367.598.412,- dan Modal Rp. 267.937.668,- dengan Realisasi Anggaran 2025 sebesar 17.570.967.962,- dengan persentase 65,97 % sedangkan pada tahun 2024 Realisasi Anggaran sebesar Rp. 15.160.974.659,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 18.610.213.575,- dengan persentase yaitu 81,47 %. terdapat Penurunan capaian realisasi pada tahun 2025 apabila dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 15,05 % sedangkan dari segi anggaran terdapat penambahan pagu anggaran.

Anggaran Belanja Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong untuk belanja Operasional pada Tahun 2025 sebesar Rp. 26.367.598.412,- dengan rincian untuk anggaran belanja Pegawai sebesar Rp. 14.167.910.000 dan belanja barang/ jasa sebesar Rp. 12.199.688.412,- sedangkan Belanja Modal sebesar Rp. 267.937.668,- dengan rincian belanja Modal Pengalatan dan Mesin sebesar Rp. 267.937.668,- dan Sebesar Rp. 0,- untuk belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Belanja yang terkait dengan belanja langsung dialokasikan untuk membiayai beberapa urusan, Program dan Kegiatan yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Inspektorat Kabupaten Tabalong Pada Tahun 2025 melalui APBD dan APBD-P Kabupaten Tabalong tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 26.635.536.080,- terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 26.367.598.412,- dan Belanja Modal Rp. 267.937.668,- berdasarkan sistem aplikasi keuangan (SIPD) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
5	**BELANJA DAERAH**	**26.635.536.080,-**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**26.367.598.412,-**
5.1.01	Belanja Pegawai	14.167.910.000,-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.199.688.412,-
5.2	**BELANJA MODAL**	**267.937.668,-**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.937.668,-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,-
	JUMLAH BELANJA	**26.635.536.080,-**

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat Kabupaten Tabalong selama Tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	**BELANJA DAERAH**	**26.635.536.080,-**	**17.570.967.962,-**	**65.97%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**26.367.598.412,-**	**17.362.620.962,-**	**65.85%**
5.1.01	Belanja Pegawai	14.167.910.000,-	12.538.687.462,-	88.50%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.199.688.412,-	4.823.933.500,-	39.54%
5.2	**BELANJA MODAL**	**267.937.668,-**	**208.347.000,-**	**77.76%**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.937.668,-	208.347.000,-	77.76%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0%
	JUMLAH BELANJA	**26.635.536.080,-**	**17.570.967.962,-**	**65.97%**

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, capaian realisasi anggaran pada Inspektorat Daerah Tabalong hanya sebesar 65.97% % dimana pada tahun anggaran 2024 capaian realisasi anggaran tersebut mencapai 81.47%. Penurunan capaian realisasi tersebut disebabkan oleh perubahan kebijakan terkait dengan realisasi biaya teknis operasional pengawasan APIP pada tahun anggaran 2025, sebagai gambaran atas pencapaian kinerja keuangan pada masing-masing program yang ada pada Inspektorat Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN

PER 31 DESEMBER 2025

Sub Unit : INSPEKTORAT DAERAH KAB. TABALONG

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**				
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah				
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencaan Perangka daerah	10.725.000	9.915.300	92.45%	809.700
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.250.000	5.845.000	70.85%	2.405.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.201.990.000	12.570.743.462	88.51%	1.631.246.538
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.750.170.000	1.284.367.249	22.34%	4.465.802.751
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.968.000	6.370.850	18.76%	27.597.150
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	335.406.069	264.275.735	78.79%	71.130.334
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.469.994	20.336.000	29.70%	48.133.994
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	5.430.000	60.33%	3.570.000
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	868.808.756	790.600.146	91.00%	78.208.610
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.260.000	3.408.270	46.95%	3.851.730
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.200.000	71.070.908	70.93%	29.129.092
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	819.778.370	566.164.712	69.06%	253.613.658

6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.060.000	124.691.480	40.35%	184.368.520
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.595.794	32.927.425	47.31%	36.668.369
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.062.545.680	452.185.637	42.56%	610.360.043
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	157.146.000	27.487.350	17.49%	129.658.650
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	379.410.000	192.910.123	50.84%	186.499.877
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	744.252.000	303.173.400	40.74%	441.078.600
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	103.847.500	66.173.400	63.72%	37.674.100
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	218.803.000	172.812.050	78.98%	45.990.950
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	52.006.000	15.229.100	29.28%	36.776.900
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	363.037.000	135.573.800	37.34%	227.463.200
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	61.300.800	5.255.000	8.57%	56.045.800
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	115.226.450	26.400.890	22.91%	88.825.560
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi				
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	110.000.000	35.986.400	32.71%	74.013.600
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	130.178.800	-	0.00%	130.178.800
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	545.100.867	381.444.581	69.98%	163.656.286
JUMLAH		**26.635.536.080**	**17.570.778.268**	**65.97%**	**9.064.757.812**

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya aparatur , sehingga Program Kegiatan belum dapat terealisasi sesuai target;
2. Adanya perubahan kebijakan dan ketentuan/peraturan per Undang-undangan sehingga memungkinkan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan yg tidak sesuai.
3. Adanya perubahan kebijakan internal SKPD terkait pembayaran biaya Teknis Pengawasan Tahun Anggaran 2025.
4. Masih kurangnya tenaga tekhnis yang sesuai dengan bidangnya.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyususnan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong.

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu unit atau lebih Entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan sebagai entitas akuntansi, Inspektorat Kabupaten Tabalong wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan kebijakan akuntansi mengacu pada kebijakan akuntansi dari entitas pelaporan keuangan daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Tabalong.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Tabalong adalah berbasis Akrual, yaitu entitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat Kas diterima atau dibayar.

4.3. Kebijakan Akuntansi

4.3.1. Pendapatan-LRA

Pengakuan pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah, atau diterima oleh SKPD, atau diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

4.3.2. Belanja

Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.3. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-Lo merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

4.3.4. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah aset pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah, sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan dengan seiring berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

4.3.5. Aset

a). Kas

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di bendahara penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid

dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tanggal perolehan.

b). Piutang

Piutang diakui saat diterbitkan surat ketetapan; atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang dicatat dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang.

c). Persediaan

Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode Perodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan, Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

d). Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat

didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja.

e). Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai sesuatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang niali tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

f). Aset lainnya

Aset lainnya digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset lainnya adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah diklasifikasikan ke dalam aset lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

g). Kewajiban

Kewajiban dapat diklarifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan . Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewjiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

h). Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan-LRA

Inspektorat Kabupaten Tabalong tidak mempunyai Realisasi Pendapatan.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	**BELANJA DAERAH**	**26.635.536.080,-**	**17.570.967.962,-**	**65.97%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**26.367.598.412,-**	**17.362.620.962,-**	**65.85%**
5.1.01	Belanja Pegawai	14.167.910.000,-	12.538.687.462,-	88.50%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.199.688.412,-	4.823.933.500,-	39.54%
5.2	**BELANJA MODAL**	**267.937.668,-**	**208.347.000,-**	**77.76%**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.937.668,-	208.347.000,-	77.76%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0%
	JUMLAH BELANJA	**26.635.536.080,-**	**17.570.967.962,-**	**65.97%**

5.1.2. Belanja

Inspektorat Kabupaten Tabalong Pada Tahun 2025 melalui APBD Kabupaten Tabalong tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. Rp 26.635.536.080,- terdiri dari belanja Operasional sebesar Rp. 26.367.598.412,- dan Modal Rp. 267.937.668,-. Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 65.97% dengan realiasi belanja pegawai Rp 12.538.687.462,- realisasi belanja Barang Jasa sebesar Rp. 4.823.933.500,- serta realisasi belanja Modal Rp. 208.347.000,- sebagai perbandingan untuk Realisasi belanja pada Tahun 2024 sebesar Rp. 15.160.974.659,- atau 81.47% dari anggaran sebesar Rp. 18.610.213.575,- yang terdiri dari Belanja Operasional Rp. 18.187.990.588,- dengan realisasi sebesar Rp 14.759.354.659,- serta belanja Modal sebesar Rp. 422.222.987,- terealisasikan sebesar Rp. 401.620.000,-

Perbandingan Realisasi Belanja TA.2024 dan 2025

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2025	ket
1	2	4	5	
5	**BELANJA DAERAH**	**15.160.974.659,-**	**17.570.967.962,-**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**14.759.354.659,-**	**17.362.620.962,-**	
5.1.01	Belanja Pegawai	11.066.692.141,-	12.538.687.462,-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.692.662.518,-	4.823.933.500,-	
5.2	**BELANJA MODAL**	**401.620.000,-**	**208.347.000,-**	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	366.620.000,-	208.347.000,-	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.000.000,-	0,-	
	JUMLAH BELANJA	**15.160.974.659,-**	**17.570967.962,-**	

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi untuk tahun berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp. 17.362.620.962,- dari anggaran sebesar Rp. 26.367.598.412,- atau mencapai 65.85 %, dan untuk realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 14.759.354.659,- dengan rincian belanja operasional pegawai Rp 11.066.692.141,- dan untuk belanja barang jasa sebesar Rp 3.692.662.518,-

Perbandingan Realisasi Belanja Operasi TA.2024 dan 2025

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2025	ket
1	2	4	5	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**14.759.354.659,-**	**17.362.620.962,-**	
5.1.01	Belanja Pegawai	11.066.692.141,-	12.538.687.462,-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.692.662.518,-	4.823.933.500,-	
	JUMLAH	**14.759.354.659,-**	**17.362.620.962,-**	

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk tahun berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp. 208.347.000,- dari anggaran sebesar Rp. 267.937.668,- atau mencapai 77.76% dan sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 401.620.000,- dengan persentase 95,12%

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA.2024 dan 2025

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	(+/-)
1	2	4	5	6= (4-5)
5.2	**BELANJA MODAL**	**208.347.000,-**	**401.620.000,-**	**(193.273.000,-)**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.347.000,-	366.620.000,-	**(158273000,-)**
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,-	35.000.000,-	**(35.000.000,-)**
	JUMLAH BELANJA MODAL	**208.347.000,-**	**401.620.000,-**	**(193.273.000,-)**

5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Neraca Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 menggambarkan posisi keuangan entitas yang terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah aset Inspektorat Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.755.933.677,67, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.262.797.998,57.

Dengan demikian, jumlah aset mengalami penurunan sebesar Rp506.864.320,90 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aset tersebut terdiri atas aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Di sisi lain, kewajiban dan ekuitas merupakan unsur yang membentuk posisi keuangan Inspektorat pada akhir periode pelaporan.

5.2.1. Aset Lancar

Pada Tahun Anggaran 2025, jumlah aset lancar Inspektorat Kabupaten Tabalong tercatat sebesar Rp. 5.517.383,00, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp. 6.564.800,00.

Komponen aset lancar terdiri atas kas dan setara kas, piutang lain-lain PAD yang sah, persediaan, serta aset untuk dikonsolidasikan. Dalam rincian neraca, kas di kas daerah tercatat sebesar negatif Rp. 17.570.967.962,00 dan aset untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 17.570.967.962,00. Piutang lain-lain PAD yang sah tercatat sebesar Rp. 940.485,00, (Piutang ini adalah Temuan BPK atas kelebihan pembayran Gaji ASN) sedangkan persediaan sebesar Rp. 4.576.898,00.

Berdasarkan data tersebut, komponen aset lancar perlu menjadi perhatian dalam proses penelaahan dan rekonsiliasi laporan keuangan, khususnya terkait

penyajian kas di kas daerah dan aset untuk dikonsolidasikan. Penjelasan mengenai penyebab saldo dan kesesuaian pencatatannya perlu didukung oleh dokumen sumber serta hasil rekonsiliasi dengan pihak terkait.

5.2.2. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap Inspektorat Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 2.750.416.294,67, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.256.233.198,57. Dengan demikian, terdapat penurunan nilai aset tetap sebesar Rp. 505.816.903,90.

Aset tetap terdiri atas tanah sebesar Rp. 268.000.000,00, peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.518.467.477,00, serta gedung dan bangunan sebesar Rp. 351.822.000,00. Sementara itu, akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 3.387.873.182,33.

Penurunan nilai aset tetap secara keseluruhan berkaitan dengan nilai tercatat setelah memperhitungkan akumulasi penyusutan dan perubahan aset selama periode pelaporan. Untuk memastikan keandalan penyajian aset tetap, diperlukan dukungan administrasi berupa daftar barang milik daerah, kartu inventaris barang, dokumen perolehan atau penghapusan aset, serta perhitungan penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2.3. Aset Lainnya

Aset lainnya pada Neraca Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 tercatat dengan nilai bruto aset lain-lain sebesar Rp. 1.000.000,00 dan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp. 1.000.000,00. Dengan demikian, jumlah aset lainnya yang disajikan dalam neraca adalah Rp. 0,00, sama dengan saldo tahun 2024.

Penyajian aset lainnya perlu didukung dengan administrasi dan dokumentasi yang memadai untuk memastikan bahwa nilai aset, akumulasi penyusutan, serta status keberadaan aset telah dicatat secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2.4. Kewajiban

Jumlah kewajiban Inspektorat Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 6.125.134,00, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp. 5.989.529,00.

Kewajiban tersebut seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek berupa utang belanja. Peningkatan saldo kewajiban sebesar Rp. 135.605,00 perlu dijelaskan berdasarkan rincian utang belanja pada akhir periode pelaporan serta dokumen pendukung yang relevan.

Pengelolaan kewajiban perlu memperhatikan ketepatan pengakuan, pengukuran, dan penyajian utang belanja, sehingga kewajiban yang tercantum dalam neraca dapat mencerminkan tanggungan yang sebenarnya pada tanggal pelaporan.

5.2.5. Ekuitas

Ekuitas Inspektorat Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 2.749.808.543,67, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp. 3.256.808.469,57.

Dalam rincian neraca, saldo ekuitas tercantum sebesar negatif Rp. 14.821.159.418,33, sedangkan Surplus/Defisit-LO tercatat sebesar negatif Rp. 18.099.523.887,90. Namun, jumlah ekuitas yang disajikan pada neraca adalah Rp. 2.749.808.543,67.

Ekuitas merupakan salah satu unsur penting dalam penyajian posisi keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perubahan ekuitas perlu ditelusuri melalui laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, jurnal koreksi, dan dokumen rekonsiliasi terkait untuk memastikan kesesuaian antara rincian akun dan jumlah ekuitas yang disajikan.

5.2.6. Kesimpulan Analisis Neraca

Berdasarkan Neraca Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025, dapat disampaikan bahwa jumlah aset pada akhir periode pelaporan adalah sebesar Rp. 2.755.933.677,67, dengan komponen terbesar berasal dari aset tetap sebesar Rp. 2.750.416.294,67.

Dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah aset mengalami penurunan sebesar Rp. 506.864.320,90. Kewajiban mengalami peningkatan dari Rp. 5.989.529,00 menjadi Rp. 6.125.134,00, sedangkan ekuitas yang disajikan mengalami penurunan dari Rp. 3.256.808.469,57 menjadi Rp. 2.749.808.543,67.

Dalam rangka mendukung keandalan pelaporan keuangan SKPD, diperlukan penguatan proses rekonsiliasi dan verifikasi atas saldo neraca, terutama pada akun kas dan setara kas, aset untuk dikonsolidasikan, aset tetap, utang belanja, dan ekuitas. Setiap saldo akun perlu didukung oleh dokumen sumber dan pencatatan yang sesuai, sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan

5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 menyajikan informasi mengenai beban operasional, defisit dari kegiatan

nonoperasional, serta surplus/defisit-LO selama periode pelaporan. Berdasarkan laporan tersebut, jumlah beban tahun 2025 sebesar Rp. 18.062.311.887,90, sedangkan tahun 2024 sebesar Rp. 15.205.208.953,43. Jumlah beban mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.857.102.934,47 atau 18,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan beban operasi serta beban penyusutan dan amortisasi.

5.3.1. Beban Operasi

Beban operasi Inspektorat Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 17.363.803.984,00, meningkat sebesar Rp. 2.598.223.229,00 atau 17,60% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp. 14.765.580.755,00.

Beban operasi terdiri atas beban pegawai serta beban barang dan jasa. Rincian beban operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan
Beban Pegawai	Rp.12.537.746.977,00	Rp.11.066.692.141,00	Naik 13,29%
Beban Barang dan Jasa	Rp. 4.826.057.007,00	Rp. 3.698.888.614,00	Naik 30,47%
Jumlah Beban Operasi	Rp.17.363.803.984,00	Rp.14.765.580.755,00	Naik 17,60%

5.3.2. Beban Pegawai

Beban pegawai pada tahun 2025 sebesar Rp. 12.537.746.977,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.471.054.836,00 atau 13,29% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp. 11.066.692.141,00.

Peningkatan beban pegawai menunjukkan adanya kenaikan nilai beban pegawai yang diakui dalam Laporan Operasional selama periode pelaporan. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab kenaikan, seperti perubahan komponen belanja pegawai atau faktor lain, tidak dirinci dalam dokumen LO yang diberikan dan perlu didukung dengan rincian akun serta dokumen terkait apabila diperlukan.

5.3.2. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 4.826.057.007,00, meningkat sebesar Rp. 1.127.168.393,00 atau 30,47% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp. 3.698.888.614,00.

Kenaikan beban barang dan jasa merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan beban operasi. Untuk memberikan penjelasan mengenai faktor penyebab kenaikan secara lebih terperinci, diperlukan rincian transaksi dan jenis beban barang dan jasa selama tahun 2025.

5.3.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp698.507.903,90, meningkat sebesar Rp258.879.705,47 atau 58,89% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp439.628.198,43.

Rincian beban penyusutan yang disajikan dalam Laporan Operasional adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Perubahan
Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 680.916.803,90	Rp. 399.754.328,10	Naik 70,33%
Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 17.591.100,00	Rp. 39.873.870,33	Turun 55,88%
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 698.507.903,90	Rp. 439.628.198,43	Naik 58,89%

Beban penyusutan peralatan dan mesin mengalami peningkatan sebesar Rp. 281.162.475,80 atau 70,33%. Sementara itu, beban penyusutan gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar Rp. 22.282.770,33 atau 55,88%.

Perubahan beban penyusutan perlu didukung oleh perhitungan penyusutan aset tetap, daftar aset, dan kebijakan masa manfaat yang berlaku, untuk memastikan bahwa beban penyusutan yang diakui telah dihitung dan disajikan secara tepat.

5.3.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi

Berdasarkan Laporan Operasional, Inspektorat Kabupaten Tabalong mencatat defisit dari operasi sebesar Rp. 18.062.311.887,90 pada tahun 2025, dibandingkan defisit sebesar Rp. 15.205.208.953,43 pada tahun 2024.

Defisit dari operasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.857.102.934,47 atau 18,79%. Nilai tersebut sejalan dengan jumlah beban operasi dan beban penyusutan serta amortisasi yang disajikan dalam laporan.

5.3.5. Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan nonoperasional pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp37.212.000,00, meningkat sebesar Rp2.712.000,00 atau 7,86% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp34.500.000,00.

Dalam rincian laporan, defisit tersebut seluruhnya berasal dari akun Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO. Dokumen yang diberikan tidak memuat rincian transaksi atau penyebab defisit nonoperasional tersebut, sehingga penjelasan lebih lanjut perlu mengacu pada rincian akun dan dokumen pendukung terkait.

5.3.6. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa pada tahun 2025 menunjukkan defisit sebesar Rp. 18.099.523.887,90, sedangkan pada tahun 2024 tercatat defisit sebesar Rp. 15.239.708.953,43.

Defisit sebelum pos luar biasa mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.859.814.934,47 atau 18,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan hasil penggabungan defisit dari operasi dan defisit kegiatan nonoperasional.

5.3.7. Pos Luar Biasa

Pada Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Kabupaten Tabalong tidak mencatat beban luar biasa. Jumlah beban luar biasa tercatat sebesar Rp 0,00, sama dengan tahun 2024.

Dengan demikian, tidak terdapat nilai beban luar biasa yang menambah defisit sebelum pos luar biasa pada laporan yang diberikan.

5.3.8. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 menunjukkan defisit sebesar Rp. 18.099.523.887,90, mengalami peningkatan defisit sebesar Rp. 2.859.814.934,47 atau 18,77% dibandingkan tahun 2024 yang mencatat defisit sebesar Rp. 15.239.708.953,43.

Defisit-LO menggambarkan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama periode pelaporan. Namun, data Laporan Operasional yang diberikan tidak memuat pos pendapatan-LO secara terpisah, sehingga narasi ini tidak menyimpulkan nilai pendapatan-LO atau penyebab rinci defisit di luar angka dan komponen yang tercantum dalam laporan.

Kesimpulan Analisis Laporan Operasional Berdasarkan Laporan Operasional Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025, dapat disampaikan bahwa jumlah beban selama periode pelaporan tercatat sebesar Rp. 18.062.311.887,90, meningkat sebesar 18,79% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan beban terutama berasal dari beban operasi sebesar Rp. 17.363.803.984,00 dan beban penyusutan serta amortisasi sebesar Rp. 698.507.903,90. Beban pegawai mengalami kenaikan sebesar 13,29%, sedangkan beban barang dan jasa meningkat sebesar 30,47%. Selain itu, beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar 58,89%, terutama dipengaruhi oleh kenaikan beban penyusutan peralatan dan mesin.

Secara keseluruhan, Laporan Operasional tahun 2025 mencatat defisit-LO sebesar Rp18.099.523.887,90. Dalam rangka mendukung keandalan pelaporan keuangan SKPD, diperlukan penguatan proses verifikasi dan rekonsiliasi terhadap beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyusutan, serta defisit kegiatan nonoperasional, dengan didukung dokumen sumber dan rincian transaksi yang memadai.

5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 menyajikan perubahan ekuitas selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Perubahan ekuitas tersebut dipengaruhi oleh ekuitas awal, Surplus/(Defisit)-LO, RK PPKD, serta dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi-koreksi.

Berikut penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dan 2025 :

Uraian	2025	2024
Ekuitas Awal	3.256.808.469,57	1.330.467.030,00
Surplus/ Defisit-LO	(18.099.523.887,90)	(15.239.708.953,43)
RK PPKD	17.570.967.962,00	15.160.974.659,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-Lain	21.556.000,00	2.005.075.734,00
Ekuitas Akhir	2.749.808.543,67	3.256.808.469,57

Ekuitas awal Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebesar Rp. 3.256.808.469,57. Selama Tahun Anggaran 2025 terjadi perubahan ekuitas yang terutama dipengaruhi oleh Defisit-LO sebesar Rp18.099.523.887,90, RK PPKD sebesar Rp. 17.570.967.962,00, serta koreksi lain-lain sebesar Rp. 21.556.000,00. Sementara itu, tidak terdapat koreksi nilai persediaan dan koreksi selisih revaluasi aset tetap.

Defisit-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 18.099.523.887,90 mengalami peningkatan dibandingkan Defisit-LO Tahun 2024 sebesar Rp. 15.239.708.953,43. Peningkatan defisit tersebut menunjukkan adanya peningkatan selisih negatif antara pendapatan-LO dan beban yang diakui selama periode Tahun Anggaran 2025, sehingga memberikan pengaruh negatif terhadap perubahan ekuitas.

Di sisi lain, RK PPKD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 17.570.967.962,00 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 15.160.974.659,00. Peningkatan RK PPKD tersebut memberikan pengaruh positif dalam perubahan ekuitas dan secara signifikan mengimbangi pengaruh negatif dari Defisit-LO

Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat koreksi nilai persediaan maupun koreksi selisih revaluasi aset tetap. Selanjutnya terdapat koreksi lain-lain sebesar Rp21.556.000,00, yang mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.005.075.734,00. Rincian lebih lanjut mengenai koreksi lain-lain disajikan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan dokumen pendukung transaksi koreksi yang dilakukan oleh SKPD

Secara keseluruhan, perubahan pada komponen-komponen tersebut menyebabkan ekuitas Inspektorat Kabupaten Tabalong pada akhir Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp2.749.808.543,67. Dibandingkan dengan ekuitas akhir Tahun 2024 sebesar Rp3.256.808.469,57, terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp506.999.925,90 atau sekitar 15,57%.

Penurunan ekuitas tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya Defisit-LO yang belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan RK PPKD dan koreksi lain-lain. Dengan demikian, posisi ekuitas akhir Tahun Anggaran 2025 mencerminkan akumulasi pengaruh transaksi operasional dan transaksi antara SKPD dengan PPKD serta koreksi akuntansi selama periode berjalan

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong.

Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Tabalong dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur dalam pelaksanaan tugas , fungsi, wewenang, hak dan kewajibannya dibantu oleh Sekretariat, para Irban, Kepala Sub.Bagian sebagai unsur pelaksana kegiatan. Sekretariat membantu Inspektur dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan Unsur pelaksana yang membantu Inspektur sesuai bidang tekhnis dibantu oleh para Irban, para Kepala sub.bagian dan para pejabat fungsional (Auditor/P2UPD).

Sesuai Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tabalong adalah :

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri dari :
   a) Kasubag Umum dan Kepegawaian
   b) Kasubag Perencanaan dan Keuangan
   c) Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu (Irban) I membawahi Auditor dan P2UPD
4. Inspektur Pembantu (Irban) II membawahi Auditor dan P2UP
5. Inspektur Pembantu (Irban) III membawahi Auditor dan P2UP
6. Inspektur Pembantu (Irban) Khusus membawahi Auditor dan P2UP
7. Jabatan Fungsional Lainnya.

1) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong disebutkan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas

membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

2) Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan;
d. pelaksanaan administrasi bidang pengawasan;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan;
f. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3) Uraian Tugas

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong dilaksanakan oleh Inspektur dan dibantu oleh Inspektur Pembantu, yaitu Inspektur Pembantu Khusus, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, dan Inspektur Pembantu III, yang didukung oleh Sekretariat dengan tiga Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Selain itu juga didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Inspektur, Sekretariat dan Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. Inspektur

   Innspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

   Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur daerah mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan.

2. Sekretariat

   Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris, membawahi :

   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dan
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

   Sekertaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah .

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

   a. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan rencana kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;
   b. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan rencana strategis Inspektorat Daerah;
   c. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan laporan evaluasi dan laporan kegiatan Inspektorat Daerah;
   d. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah ;
   e. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengelolaan aset;
   f. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
   g. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengadministrasian kepegawaian ;

h. Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
i. pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengelolaan humas dan protokol Inspektorat Daerah; dan
j. pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan secretariat

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah;
b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran Inspektorat Daerah;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kelja sama penyusunan rencana strategis;
d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset;
f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan perencanaan dan keuangan;
g. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran serta mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
i. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungj awaban;
j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program dan laporan keuangan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

a. merencanakan dan menyusun program dan Rencana Kinerja pertahun anggaran subbagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksana kegiatan;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;

c. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;

d. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah;

e. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Inspektorat Daerah;

f. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah;

g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Inspektorat Daerah ;

h. melaksanakan penyusunan rekapitulasi pelaporan kegiatan Inspektorat Daerah;

i. menyusun hasil evaluasi terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah;

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;

k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun ekstemal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesual dengan lingkup tugas dan fungsinya

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa/usul satya lencana, usul cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul ujian dinas, usul pencantuman gelar, usul Pelaksana Tugas/ Pelaksana Harian, usul Jabatan Fungsional, usul pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, usul penyesuaian masa kerja, usul Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Monev E SKP, Monev E-Kinerja, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja a pegawai;
e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
h. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
i. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
j. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
k. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang undangan;
l. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
m. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Inspektur Pembantu Khusus.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur Daerah lingkup pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan nasional dan investigasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan kinerja lingkup Inspektorat Pembantu Khusus;
b. pengoordinasian perumusan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan bidang pelaksanaan kebijakan nasional dan investigasi;
c. pengoordinasian perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan bidang pelaksanaan kebijakan nasional dan investigasi;
d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaran pemerintahan daerah bidang pelaksanaan kebijakan nasional dan investigasi;
e. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pelaksanaan kebijakan nasional dan investigasi;
f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati ;
g. pengoordinasian pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, pencegahan korupsi dan penegakan integritas;
h. pengoordinasian kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
i. pelaksanaan audit investigasi, probity audit, pengawasan atas pengaduan masyarakat, pengawasan dengan tujuan tertentu, manajemen kepegawaian, tuntutan ganti kerugian daerah dan pengendalian gratifikasi;
j. pengoordinasian evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
k. pengoordinasian pelaksanaan satuan Tugas sapu Bersih pungutan Liar;
l. pelaksanaan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

m. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pelaksanaan kebijakan nasional dan investigasi;
n. pengoordinasian pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang pelaksanaan kebijakan nasional dan investigasi; dan
o. pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi lain terkait sesuai tugas dan fungsinya

4. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur Daerah lingkup pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan perangkat daerah bidang keuangan, pembangunan dan investasi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan kinelja lingkup Inspektorat Pembantu I;
b. pengoordinasian perumusan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pekeljaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, pertanahan, 1ingkungan hidup, perhubungan, pangan, pertanian, perikanan, penanaman modal dan penunjang urusan keuangan;
c. pengoordinasian perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, pangan, pertanian, perikanan, penanaman modal dan penunjang urusan keuangan;
d. mengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaran pemerintahan daerah urusan pekeljaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, pertanahan, 1ingkungan hidup, perhubungan, pangan, pertanian, perikanan, penanamari modal dan penunjang urusan keuangan;

e. pengoordinasian pengawasan keuangan dan kinelja terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pekeljaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, pangan, pertanian, perikanan, penariaman modal dan penunjang urusan keuangan;
f. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pekeljaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, pangan, pertanian, perikanan, penanaman modal dan penunjang urusan keuangan;
g. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang keuangan, pembangunan dan investasi daerah;
h. pengoordinasian pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang keuangan, pembangunan dan investasi daerah; dan
i. pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi lain terkait sesuai tugas dan fungsinya.

5. Inspektur Pembantu II

Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur lingkup pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan perangkat daerah bidang pelayanan umum, pemerintahan dan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan kinelja lingkup Inspektorat Pembantu II
b. pengoordinasian perumusan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kecamatan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan inforrnasi, statistik, persandian, penunjang urusan perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan latihan, penelitian pembangunan, kesatuan bangsa dan politik, sekretariat daerah, sekretariat dewan, dan Inspektorat daerah;

c. pengoordinasian perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kecamatan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan inforrnasi, statistik, persandian, penunjang urusan perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan latihan, penelitian pembangunan, kesatuan bangsa dan politik, sekretariat daerah, sekretariat dewan, dan Inspektorat daerah;
d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaran pemerintahan daerah urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kecamatan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informasi, statistik, persandian, penunjang urusan perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan latihan, penelitian pembangunan, kesatuan bangsa dan politik, sekretariat daerah, sekretariat dewan, dan Inspektorat daerah;
e. pengoordinasian pengawasan keuangan dan kinelja terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kecamatan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informasi, statistik, persandian, penunjang urusan perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan latihan, penelitian pembangunan, kesatuan bangsa dan politik, sekretariat daerah, sekretariat dewan, dan Inspektorat Daerah;
f. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kecamatan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, komunikasi dan informasi, statistik, persandian, penunjang urusan perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan latihan, penelitian pembangunan, kesatuan bangsa dan politik, sekretariat daerah, sekretariat dewan, dan Inspektorat Daerah;

g. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan bidangpelayanan umum, pemerintahan dan aparatur;
h. pengoordinasian pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang pelayanan umum, pemerintahan dan aparatur; dan
i. pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah propinsi, pemerintah pusat, dan instansi lain terkait sesuai tugas dan fungsinya.

6. Inspektur Pembantu III

Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur Daerah lingkup pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan perangkat daerah bidang pendidikan, perekonomian, sosial dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :

a. perencanaan program, kegiatan dan kinerja lingkup Inspektorat Pembantu III
b. pengoordinasian perumusan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, sosial, tenaga kelja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi, usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan , kearsipan, perdagangan dan perindustrian ;
c. pengoordinasian perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, sosial, tenaga kelja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi, usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, perdagangan dan perindustrian;
d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaran pemerintahan daerah urusan pendidikan, sosial, tenaga keria, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi, usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, perdagangan dan perindustrian;

e. pengoordinasian pengawasan keuangan dan kinelja terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, sosial, tenaga kelja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi, usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, perdagangan dan perindustrian;
f. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan terhadap perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan, sosial, tenaga kelja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi, usaha kecil dan menengah, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, perdagangan dan perindustrian;
g. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pendidikan, perekonomian, sosial dan budaya;
h. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang pendidikan, perekonomian, sosial dan budaya; dan
i. pelaksanaan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah propinsi, pemerintah pusat, dan instansi lain terkait sesuai tugas dan fungsinya.

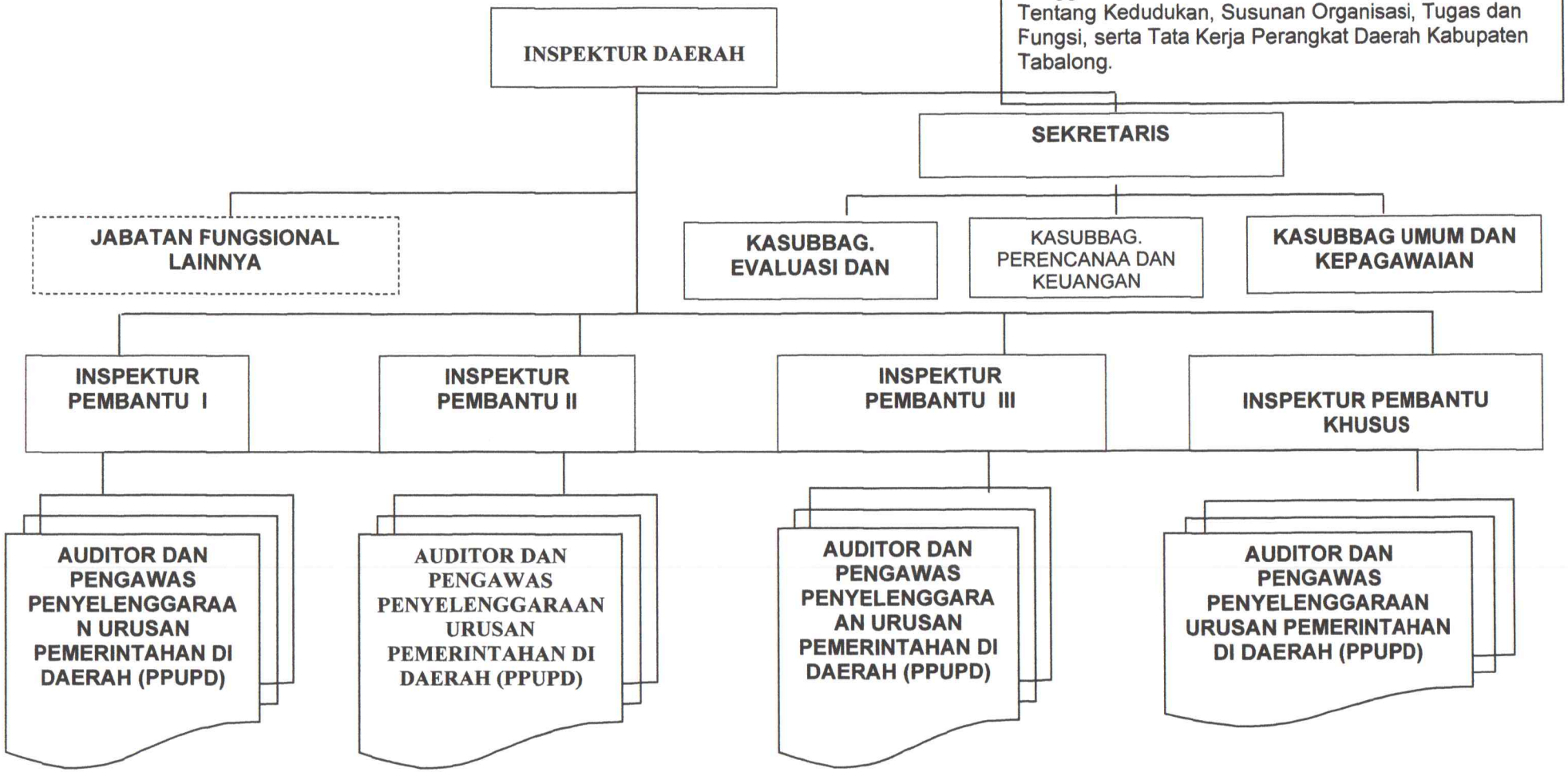
7. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Secara rinci Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, digambarkan sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
TABALONG

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor : 69 Tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.



BAB VII
P E N U T U P

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dengan penyajian Neraca perolehan selama Tahun Anggaran 2025, berdasarkan atau melalui proses siklus akuntansi berbasis Akrual. Basis Akrual adalah metode akuntansi yang mengakui Pendapatan dan Biaya pada saat transaksi terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan, dalam basis akuntansi akrual ini juga pandapatan diakui pada saat hak dan kewajinam telah terjadi, sedangkan biaya diakui pada saat kewajiban telah terjadi. Pencatatan atas persediaan telah dilakukan sepenuhnya sesuai standar akuntansi pemerintahan dan telah dilakukan cek fisik persediaan.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini disampaikan semoga menjadi bahan selanjutnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 5 Juni 2026
Pengguna Anggaran,

DIYANTO, SE, MT, FRMP
Pembina Tk.I
NIP. 19110132005011005

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jaksa Agung Suprapto,Kel. Tanjung, Kec. Tanjung, Kode Pos 71513
Laman: www.inspektorat.tabalongkab.go.id Pos el: inspektorat@tabalongkab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional (LO ; (c) Laporan Perubahan Ekuiatas (LPE); (d) Neraca; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawaban kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) Penatausahaan berbasis Akrual.

Tanjung, 5 Juni 2026
Pengguna Anggaran,

DIYANTO, SE, MT, FRMP
Pembina Tk.I
NIP. 19110132005011005

PEMERINTAHAN KAB. TABALONG
INSPEKTORAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**26.635.536.080,00**	**17.570.967.962,00**	**65,96**	**15.160.974.659,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**26.367.598.412,00**	**17.362.620.962,00**	**65,84**	**14.759.354.659,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	14.167.910.000,00	12.538.687.462,00	88,50	11.066.692.141,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.199.688.412,00	4.823.933.500,00	39,54	3.692.662.518,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**26.367.598.412,00**	**17.362.620.962,00**	**65,84**	**14.759.354.659,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**267.937.668,00**	**208.347.000,00**	**77,75**	**401.620.000,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	267.937.668,00	208.347.000,00	77,75	366.620.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**267.937.668,00**	**208.347.000,00**	**77,75**	**401.620.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**26.635.536.080,00**	**17.570.967.962,00**	**65,96**	**15.160.974.659,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(26.635.536.080,00)**	**(17.570.967.962,00)**	**65,96**	**(15.160.974.659,00)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(26.635.536.080,00)**	**(17.570.967.962,00)**	**65,96**	**(15.160.974.659,00)**

Kab. Tabalong, 5 Juni 2026
INSPEKTUR DAERAH,

Diyanto, SE, MT
NIP.197110132005011005

PEMERINTAHAN KABUPATEN TABALONG
INSPEKTORAT
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**2.755.933.677,67**	**3.262.797.998,57**
1.1	**ASET LANCAR**	**5.517.383,00**	**6.564.800,00**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(17.570.967.962,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(17.570.967.962,00)	0,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	940.485,00	0,00
1.1.12	Persediaan	4.576.898,00	6.564.800,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	17.570.967.962,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**5.517.383,00**	**6.564.800,00**
1.3	**ASET TETAP**	**2.750.416.294,67**	**3.256.233.198,57**
1.3.01	Tanah	268.000.000,00	268.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.518.467.477,00	5.325.776.477,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	351.822.000,00	351.822.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(3.387.873.182,33)	(2.689.365.278,43)
	JUMLAH ASET TETAP	**2.750.416.294,67**	**3.256.233.198,57**
1.5.04	Aset Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**2.755.933.677,67**	**3.262.797.998,57**
2	**KEWAJIBAN**	**6.125.134,00**	**5.989.529,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**6.125.134,00**	**5.989.529,00**
2.1.06	Utang Belanja	6.125.134,00	5.989.529,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**6.125.134,00**	**5.989.529,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**6.125.134,00**	**5.989.529,00**
3	**EKUITAS**	**2.749.808.543,67**	**3.256.808.469,57**
3.1.01	Ekuitas	(14.821.159.418,33)	(11.904.166.189,43)
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(18.099.523.887,90)	(15.239.708.953,43)
	JUMLAH EKUITAS	**2.749.808.543,67**	**3.256.808.469,57**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.755.933.677,67**	**3.262.797.998,57**

Kab. Tabalong, 5 Juni 2026
INSPEKTUR DAERAH,

Diyanto, SE, MT
NIP.197110132005011005

PEMERINTAHAN KABUPATEN TABALONG

INSPEKTORAT

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2025

1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	**BEBAN**	**18.062.311.887,90**	**15.205.208.953,43**	**2.857.102.934,47**	**18,79**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**17.363.803.984,00**	**14.765.580.755,00**	**2.598.223.229,00**	**17,60**
8.1.01	Beban Pegawai	12.537.746.977,00	11.066.692.141,00	1.471.054.836,00	13,29
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.826.057.007,00	3.698.888.614,00	1.127.168.393,00	30,47
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**17.363.803.984,00**	**14.765.580.755,00**	**2.598.223.229,00**	**17,60**
8.1.08	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**698.507.903,90**	**439.628.198,43**	**258.879.705,47**	**58,89**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	680.916.803,90	399.754.328,10	281.162.475,80	70,33
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.591.100,00	39.873.870,33	(22.282.770,33)	(55,88)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**698.507.903,90**	**439.628.198,43**	**258.879.705,47**	**58,89**
	JUMLAH BEBAN	**18.062.311.887,90**	**15.205.208.953,43**	**2.857.102.934,47**	**18,79**
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**(18.062.311.887,90)**	**(15.205.208.953,43)**	**(2.857.102.934,47)**	**18,79**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
8.4	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**	**37.212.000,00**	**34.500.000,00**	**2.712.000,00**	**7,86**
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	37.212.000,00	34.500.000,00	2.712.000,00	7,86
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**37.212.000,00**	**34.500.000,00**	**2.712.000,00**	**7,86**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(37.212.000,00)**	**(34.500.000,00)**	**(2.712.000,00)**	**7,86**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(18.099.523.887,90)**	**(15.239.708.953,43)**	**(2.859.814.934,47)**	**18,77**
POS LUAR BIASA					
8.5	**BEBAN LUAR BIASA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(18.099.523.887,90)**	**(15.239.708.953,43)**	**(2.859.814.934,47)**	**18,77**

Kab. Tabalong, 5 Juni 2026

INSPEKTUR DAERAH,

DIYANTO, SE, MT,FRMP

NIP.197110132005011005

PEMERINTAH KAB. TABALONG
INSPEKTORAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	3.256.808.469,57	1.330.467.030,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(18.099.523.887,90)	(15.239.708.953,43)
RK PPKD	17.570.967.962,00	15.160.974.659,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	21.556.000,00	2.005.075.734,00
EKUITAS AKHIR	2.749.808.543,67	3.256.808.469,57

Kab. Tabalong, 5 Juni 2026
INSPEKTUR DAERAH,

Diyanto, SE, MT
NIP.197110132005011005

. Saldo TU: : Rp0,00

. Saldo UP: : Rp0,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp0,00

. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Diyanto, SE, MT
197110132005011005

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

Sumiati, SE
198011302007012006

Tanggal	No. Referensi	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
30/12/2025 22:03	FT25364XY67Y	POTONGAN SP2D AC-2003863266	-IDR Rp. 307,515,502		IDR Rp. 524,951,040.00
30/12/2025 22:03	FT25364V62CG	Transfer In RKUD KAB. TABALONG PRMNTN PMBY TPP PPPK UB DES 2025 From Acc.No.- 2003862464 SPMU No : 63.09/04.0/000098/LS/6.01.0.00.0.0		IDR Rp. 13,158,559	IDR Rp. 538,109,599.00
30/12/2025 22:03	FT25364V62CG	POTONGAN SP2D AC-2003863266	-IDR Rp. 126,526		IDR Rp. 537,983,073.00
30/12/2025 22:03	FT25364V62CG	POTONGAN SP2D AC-2003863266	-IDR Rp. 506,104		IDR Rp. 537,476,969.00
30/12/2025 22:10	FT25364TCWRL	Transfer In RKUD KAB. TABALONG PRMNTAAN PMBYRN INSPEKTORAT From Acc.No.- 2003862464 SPMU No : 63.09/04.0/000097/LS/6.01.0.00.0.00		IDR Rp. 6,880,000	IDR Rp. 544,356,969.00
30/12/2025 22:10	FT25364TCWRL	POTONGAN SP2D AC-2003863266	-IDR Rp. 344,000		IDR Rp. 544,012,969.00
30/12/2025 23:15	FT25364K955N	Transfer Out 005056 INSPEKTORAT PB TPP INSPEKTORAT DAERAH DES 25 To Acc.No.- 2310003045 PB TPP INSPEKTORAT DAERAH DES 25	-IDR Rp. 537,476,969		IDR Rp. 6,536,000.00
31/12/2025 10:56	FT25365GZX5D	Transfer Out SUMIATI HONOR POL BP SKPD To Acc.No.- 2000979228 Penerima : SUMIATI HONOR POL BP SKPD	-IDR Rp. 2,508,000		IDR Rp. 4,028,000.00
31/12/2025 10:56	FT25365M0ZF7	Transfer Out HAIRUL FAHMI HONOR POL PPK SKPD To Acc.No.- 2000979247 Penerima : HAIRUL FAHMI HONOR POL PPK SKPD	-IDR Rp. 2,888,000		IDR Rp. 1,140,000.00
31/12/2025 10:57	FT25365WRK3M	Transfer Out NORLIANA HONOR PENGELOLA BMD To Acc.No.- 2000968218 Penerima : NORLIANA HONOR PENGELOLA BMD	-IDR Rp. 1,140,000		IDR Rp. 0.00
31/12/2025 04:09	FT25365QXLC5	Transfer In RKUD KAB. TABALONG PRMNTAAN PMBYRN 20% TPP INSPEKTORAT From Acc.No.- 2003862464 SPMU No : 63.09/04.0/000100/LS/6.01.0.00.		IDR Rp. 3,202,800	IDR Rp. 3,202,800.00
31/12/2025 06:47	FT25365LMKN5	Transfer Out JUKHARI TPP 20 Persen dibulan Desember 2025 To Acc.No.- 2000968067 Penerima : JUKHARI TPP 20 Persen dibulan Desember 2025	-IDR Rp. 3,202,800		IDR Rp. 0.00

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SKPD : INSPEKTORAT

Tahun Anggaran : 2025

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD

(SPJ FUNGSIONAL)

Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	**BELANJA DAERAH**	Rp26.635.536.080,00	Rp10.819.478.054,00	Rp1.751.289.408,00	Rp12.570.767.462,00	Rp259.440.000,00	Rp604.674.899,00	Rp864.114.899,00	Rp3.361.917.970,00	Rp774.167.631,00	Rp4.136.085.601,00	Rp17.570.967.962,00	Rp9.064.568.118
5.1	**BELANJA OPERASI**	Rp26.367.598.412,00	Rp10.819.478.054,00	Rp1.751.289.408,00	Rp12.570.767.462,00	Rp259.440.000,00	Rp396.327.899,00	Rp655.767.899,00	Rp3.361.917.970,00	Rp774.167.631,00	Rp4.136.085.601,00	Rp17.362.620.962,00	Rp9.004.977.450
5.1.01	**Belanja Pegawai**	Rp14.167.910.000,00	Rp10.790.438.054,00	Rp1.748.249.408,00	Rp12.538.687.462,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.538.687.462,00	Rp1.629.222.538
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	Rp12.199.688.412,00	Rp29.040.000,00	Rp3.040.000,00	Rp32.080.000,00	Rp259.440.000,00	Rp396.327.899,00	Rp655.767.899,00	Rp3.361.917.970,00	Rp774.167.631,00	Rp4.136.085.601,00	Rp4.823.933.500,00	Rp7.375.754.912
5.2	**BELANJA MODAL**	Rp267.937.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.347.000,00	Rp208.347.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.347.000,00	Rp59.590.668
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	Rp267.937.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.347.000,00	Rp208.347.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.347.000,00	Rp59.590.668
INSPEKTORAT		Rp26.635.536.080,00	Rp10.819.478.054,00	Rp1.751.289.408,00	Rp12.570.767.462,00	Rp259.440.000,00	Rp604.674.899,00	Rp864.114.899,00	Rp3.361.917.970,00	Rp774.167.631,00	Rp4.136.085.601,00	Rp17.570.967.962,00	Rp9.064.568.118
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp22.592.681.983,00	Rp10.819.478.054,00	Rp1.751.289.408,00	Rp12.570.767.462,00	Rp259.440.000,00	Rp503.348.478,00	Rp762.788.478,00	Rp1.991.084.021,00	Rp431.530.576,00	Rp2.422.614.597,00	Rp15.756.170.537,00	Rp6.836.511.446
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp18.975.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.885.300,00	Rp1.875.000,00	Rp15.760.300,00	Rp15.760.300,00	Rp3.214.700
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.040.300,00	Rp1.875.000,00	Rp9.915.300,00	Rp9.915.300,00	Rp809.700
5.1	BELANJA OPERASI	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.040.300,00	Rp1.875.000,00	Rp9.915.300,00	Rp9.915.300,00	Rp809.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.040.300,00	Rp1.875.000,00	Rp9.915.300,00	Rp9.915.300,00	Rp809.700
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.040.300,00	Rp1.875.000,00	Rp9.915.300,00	Rp9.915.300,00	Rp809.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.040.300,00	Rp1.875.000,00	Rp9.915.300,00	Rp9.915.300,00	Rp809.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.705.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.040.300,00	Rp855.000,00	Rp8.895.300,00	Rp8.895.300,00	Rp809.700
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.020.000,00	Rp1.020.000,00	Rp1.020.000,00	Rp0
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.845.000,00	Rp0,00	Rp5.845.000,00	Rp5.845.000,00	Rp2.405.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.845.000,00	Rp0,00	Rp5.845.000,00	Rp5.845.000,00	Rp2.405.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.845.000,00	Rp0,00	Rp5.845.000,00	Rp5.845.000,00	Rp2.405.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.845.000,00	Rp0,00	Rp5.845.000,00	Rp5.845.000,00	Rp2.405.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.845.000,00	Rp0,00	Rp5.845.000,00	Rp5.845.000,00	Rp2.405.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.845.000,00	Rp0,00	Rp5.845.000,00	Rp5.845.000,00	Rp2.405.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp14.201.990.000,00	Rp10.819.478.054,00	Rp1.751.289.408,00	Rp12.570.767.462,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.570.767.462,00	Rp1.631.222.538
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp14.201.990.000,00	Rp10.819.478.054,00	Rp1.751.289.408,00	Rp12.570.767.462,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.570.767.462,00	Rp1.631.222.538
5.1	BELANJA OPERASI	Rp14.201.990.000,00	Rp10.819.478.054,00	Rp1.751.289.408,00	Rp12.570.767.462,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.570.767.462,00	Rp1.631.222.538
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp14.167.910.000,00	Rp10.790.438.054,00	Rp1.748.249.408,00	Rp12.538.687.462,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.538.687.462,00	Rp1.629.222.538
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.564.070.000,00	Rp4.487.466.643,00	Rp658.504.644,00	Rp5.145.971.287,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.145.971.287,00	Rp418.098.713
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp2.737.822.000,00	Rp2.413.877.389,00	Rp196.869.280,00	Rp2.610.746.669,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.610.746.669,00	Rp127.075.331
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp2.589.190.000,00	Rp2.324.687.240,00	Rp184.746.980,00	Rp2.509.434.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.509.434.220,00	Rp79.755.780
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp148.632.000,00	Rp89.190.149,00	Rp12.122.300,00	Rp101.312.449,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.312.449,00	Rp47.319.551
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp295.244.000,00	Rp206.570.006,00	Rp15.051.462,00	Rp221.621.468,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp221.621.468,00	Rp73.622.532
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp271.176.000,00	Rp201.892.750,00	Rp14.987.390,00	Rp216.880.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.880.140,00	Rp54.295.860
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp24.068.000,00	Rp4.677.256,00	Rp64.072,00	Rp4.741.328,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.741.328,00	Rp19.326.672
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp152.643.000,00	Rp123.975.000,00	Rp6.660.000,00	Rp130.635.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.635.000,00	Rp22.008.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp152.643.000,00	Rp123.975.000,00	Rp6.660.000,00	Rp130.635.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.635.000,00	Rp22.008.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp354.849.000,00	Rp267.300.000,00	Rp21.350.000,00	Rp288.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp288.650.000,00	Rp66.199.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp347.545.000,00	Rp260.540.000,00	Rp20.830.000,00	Rp281.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.370.000,00	Rp66.175.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp7.304.000,00	Rp6.760.000,00	Rp520.000,00	Rp7.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.280.000,00	Rp24.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp62.649.000,00	Rp34.960.000,00	Rp3.700.000,00	Rp38.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.660.000,00	Rp23.989.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp40.800.000,00	Rp31.850.000,00	Rp3.150.000,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp5.800.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp21.849.000,00	Rp3.110.000,00	Rp550.000,00	Rp3.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.660.000,00	Rp18.189.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp184.799.000,00	Rp112.118.230,00	Rp8.980.080,00	Rp121.098.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.098.310,00	Rp63.700.690
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp168.237.000,00	Rp108.123.060,00	Rp8.617.980,00	Rp116.741.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.741.040,00	Rp51.495.960
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp16.562.000,00	Rp3.995.170,00	Rp362.100,00	Rp4.357.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.357.270,00	Rp12.204.730
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp1.467.974.000,00	Rp1.086.565.399,00	Rp367.852.011,00	Rp1.454.417.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.454.417.410,00	Rp13.556.590
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp1.467.974.000,00	Rp1.086.565.399,00	Rp367.852.011,00	Rp1.454.417.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.454.417.410,00	Rp13.556.590
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp134.000,00	Rp35.896,00	Rp3.100,00	Rp38.996,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.996,00	Rp95.004
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp108.000,00	Rp33.690,00	Rp2.851,00	Rp36.541,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.541,00	Rp71.459
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp26.000,00	Rp2.206,00	Rp249,00	Rp2.455,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.455,00	Rp23.545
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp275.719.000,00	Rp222.388.584,00	Rp36.148.752,00	Rp258.537.336,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp258.537.336,00	Rp17.181.664
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp263.478.000,00	Rp215.614.803,00	Rp34.607.857,00	Rp250.222.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.222.660,00	Rp13.255.340
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp12.241.000,00	Rp6.773.781,00	Rp1.540.895,00	Rp8.314.676,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.314.676,00	Rp3.926.324

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp8.998.000,00	Rp4.919.048,00	Rp472.492,00	Rp5.391.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.391.540,00	Rp3.606.460
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp8.061.000,00	Rp4.715.383,00	Rp443.397,00	Rp5.158.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.158.780,00	Rp2.902.220
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp937.000,00	Rp203.665,00	Rp29.095,00	Rp232.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.760,00	Rp704.240
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp21.712.000,00	Rp14.757.091,00	Rp1.417.467,00	Rp16.174.558,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.174.558,00	Rp5.537.442
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp19.999.000,00	Rp14.146.124,00	Rp1.330.186,00	Rp15.476.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.476.310,00	Rp4.522.690
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp1.713.000,00	Rp610.967,00	Rp87.281,00	Rp698.248,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp698.248,00	Rp1.014.752
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp1.527.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.527.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp841.000
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp686.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp686.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp8.603.840.000,00	Rp6.302.971.411,00	Rp1.089.744.764,00	Rp7.392.716.175,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.392.716.175,00	Rp1.211.123.825
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp4.774.300.000,00	Rp3.397.279.057,00	Rp597.611.232,00	Rp3.994.890.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.994.890.289,00	Rp779.409.711
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp4.564.873.000,00	Rp3.326.630.410,00	Rp576.556.557,00	Rp3.903.186.967,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.903.186.967,00	Rp661.686.033
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp209.427.000,00	Rp70.648.647,00	Rp21.054.675,00	Rp91.703.322,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.703.322,00	Rp117.723.678
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp2.811.555.000,00	Rp2.171.251.299,00	Rp355.495.857,00	Rp2.526.747.156,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.526.747.156,00	Rp284.807.844
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp2.769.668.000,00	Rp2.157.128.140,00	Rp351.284.924,00	Rp2.508.413.064,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.508.413.064,00	Rp261.254.936
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	Rp41.887.000,00	Rp14.123.159,00	Rp4.210.933,00	Rp18.334.092,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.334.092,00	Rp23.552.908
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Rp1.002.145.000,00	Rp728.651.055,00	Rp132.797.675,00	Rp861.448.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp861.448.730,00	Rp140.696.270
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	Rp1.002.145.000,00	Rp728.651.055,00	Rp132.797.675,00	Rp861.448.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp861.448.730,00	Rp140.696.270
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp15.840.000,00	Rp5.790.000,00	Rp3.840.000,00	Rp9.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.630.000,00	Rp6.210.000
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp15.840.000,00	Rp5.790.000,00	Rp3.840.000,00	Rp9.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.630.000,00	Rp6.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp34.080.000,00	Rp29.040.000,00	Rp3.040.000,00	Rp32.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.080.000,00	Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp34.080.000,00	Rp29.040.000,00	Rp3.040.000,00	Rp32.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.080.000,00	Rp2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp34.080.000,00	Rp29.040.000,00	Rp3.040.000,00	Rp32.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.080.000,00	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp34.080.000,00	Rp29.040.000,00	Rp3.040.000,00	Rp32.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.080.000,00	Rp2.000.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp5.750.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.520.000,00	Rp295.001.478,00	Rp474.521.478,00	Rp706.209.413,00	Rp103.636.358,00	Rp809.845.771,00	Rp1.284.367.249,00	Rp4.465.802.751

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp5.750.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.520.000,00	Rp295.001.478,00	Rp474.521.478,00	Rp706.209.413,00	Rp103.636.358,00	Rp809.845.771,00	Rp1.284.367.249,00	Rp4.465.802.751
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.750.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.520.000,00	Rp295.001.478,00	Rp474.521.478,00	Rp706.209.413,00	Rp103.636.358,00	Rp809.845.771,00	Rp1.284.367.249,00	Rp4.465.802.751
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.750.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.520.000,00	Rp295.001.478,00	Rp474.521.478,00	Rp706.209.413,00	Rp103.636.358,00	Rp809.845.771,00	Rp1.284.367.249,00	Rp4.465.802.751
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.829.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.520.000,00	Rp184.100.000,00	Rp363.620.000,00	Rp376.015.469,00	Rp3.900.000,00	Rp379.915.469,00	Rp743.535.469,00	Rp2.085.484.531
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp142.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp11.200.000,00	Rp130.820.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp115.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp2.700.000,00	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp11.200.000,00	Rp104.300.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp26.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.520.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp2.687.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.520.000,00	Rp181.400.000,00	Rp360.920.000,00	Rp367.515.469,00	Rp3.900.000,00	Rp371.415.469,00	Rp732.335.469,00	Rp1.954.664.531
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp2.687.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.520.000,00	Rp181.400.000,00	Rp360.920.000,00	Rp367.515.469,00	Rp3.900.000,00	Rp371.415.469,00	Rp732.335.469,00	Rp1.954.664.531
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp2.921.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.901.478,00	Rp110.901.478,00	Rp330.193.944,00	Rp99.736.358,00	Rp429.930.302,00	Rp540.831.780,00	Rp2.380.318.220
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp2.921.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.901.478,00	Rp110.901.478,00	Rp330.193.944,00	Rp99.736.358,00	Rp429.930.302,00	Rp540.831.780,00	Rp2.380.318.220
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.921.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.901.478,00	Rp110.901.478,00	Rp330.193.944,00	Rp99.736.358,00	Rp429.930.302,00	Rp540.831.780,00	Rp2.380.318.220
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.315.652.819,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.347.000,00	Rp208.347.000,00	Rp752.021.755,00	Rp126.643.976,00	Rp878.665.731,00	Rp1.087.012.731,00	Rp228.640.088
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp33.968.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.208.350,00	Rp4.162.500,00	Rp6.370.850,00	Rp6.370.850,00	Rp27.597.150
5.1	BELANJA OPERASI	Rp33.968.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.208.350,00	Rp4.162.500,00	Rp6.370.850,00	Rp6.370.850,00	Rp27.597.150
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp33.968.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.208.350,00	Rp4.162.500,00	Rp6.370.850,00	Rp6.370.850,00	Rp27.597.150
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp17.547.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.208.350,00	Rp4.162.500,00	Rp6.370.850,00	Rp6.370.850,00	Rp11.176.930
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp17.547.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.208.350,00	Rp4.162.500,00	Rp6.370.850,00	Rp6.370.850,00	Rp11.176.930
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp17.547.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.208.350,00	Rp4.162.500,00	Rp6.370.850,00	Rp6.370.850,00	Rp11.176.930
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp16.420.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.420.220
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp16.420.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.420.220
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp16.420.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.420.220
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp335.406.069,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.347.000,00	Rp208.347.000,00	Rp24.448.723,00	Rp31.480.012,00	Rp55.928.735,00	Rp264.275.735,00	Rp71.130.334
5.1	BELANJA OPERASI	Rp67.468.401,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.448.723,00	Rp31.480.012,00	Rp55.928.735,00	Rp55.928.735,00	Rp11.539.666
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp67.468.401,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.448.723,00	Rp31.480.012,00	Rp55.928.735,00	Rp55.928.735,00	Rp11.539.666
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp67.468.401,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.448.723,00	Rp31.480.012,00	Rp55.928.735,00	Rp55.928.735,00	Rp11.539.666
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp67.468.401,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.448.723,00	Rp31.480.012,00	Rp55.928.735,00	Rp55.928.735,00	Rp11.539.666

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp13.331.245,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.023,00	Rp0,00	Rp11.721.023,00	Rp11.721.023,00	Rp1.610.222
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp18.024.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.177.700,00	Rp6.160.012,00	Rp17.337.712,00	Rp17.337.712,00	Rp687.128
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp28.443.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.420.000,00	Rp24.420.000,00	Rp24.420.000,00	Rp4.023.220
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp7.669.096,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.550.000,00	Rp900.000,00	Rp2.450.000,00	Rp2.450.000,00	Rp5.219.096
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.2	BELANJA MODAL	Rp267.937.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.347.000,00	Rp208.347.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.347.000,00	Rp59.590.668
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp267.937.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.347.000,00	Rp208.347.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.347.000,00	Rp59.590.668
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp267.937.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.347.000,00	Rp208.347.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.347.000,00	Rp59.590.668
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp5.422.603,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.106.000,00	Rp5.106.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.106.000,00	Rp316.603
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp5.422.603,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.106.000,00	Rp5.106.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.106.000,00	Rp316.603
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp262.515.065,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.241.000,00	Rp203.241.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.241.000,00	Rp59.274.065
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	Rp131.837.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.205.000,00	Rp128.205.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.205.000,00	Rp3.632.760
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	Rp130.677.305,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.036.000,00	Rp75.036.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.036.000,00	Rp55.641.305
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp68.469.994,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.217.750,00	Rp5.118.250,00	Rp20.336.000,00	Rp20.336.000,00	Rp48.133.994
5.1	BELANJA OPERASI	Rp68.469.994,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.217.750,00	Rp5.118.250,00	Rp20.336.000,00	Rp20.336.000,00	Rp48.133.994
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp68.469.994,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.217.750,00	Rp5.118.250,00	Rp20.336.000,00	Rp20.336.000,00	Rp48.133.994
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp68.469.994,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.217.750,00	Rp5.118.250,00	Rp20.336.000,00	Rp20.336.000,00	Rp48.133.994
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp68.469.994,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.217.750,00	Rp5.118.250,00	Rp20.336.000,00	Rp20.336.000,00	Rp48.133.994
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp54.667.378,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.250,00	Rp5.118.250,00	Rp15.618.500,00	Rp15.618.500,00	Rp39.048.878
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp13.802.616,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.717.500,00	Rp0,00	Rp4.717.500,00	Rp4.717.500,00	Rp9.085.116
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.960.000,00	Rp2.470.000,00	Rp5.430.000,00	Rp5.430.000,00	Rp3.570.000
5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.960.000,00	Rp2.470.000,00	Rp5.430.000,00	Rp5.430.000,00	Rp3.570.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.960.000,00	Rp2.470.000,00	Rp5.430.000,00	Rp5.430.000,00	Rp3.570.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.960.000,00	Rp2.470.000,00	Rp5.430.000,00	Rp5.430.000,00	Rp3.570.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.960.000,00	Rp2.470.000,00	Rp5.430.000,00	Rp5.430.000,00	Rp3.570.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp2.470.000,00	Rp2.770.000,00	Rp2.770.000,00	Rp3.230.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.660.000,00	Rp0,00	Rp2.660.000,00	Rp2.660.000,00	Rp340.000
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp868.808.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp707.186.932,00	Rp83.413.214,00	Rp790.600.146,00	Rp790.600.146,00	Rp78.208.610
5.1	BELANJA OPERASI	Rp868.808.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp707.186.932,00	Rp83.413.214,00	Rp790.600.146,00	Rp790.600.146,00	Rp78.208.610
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp868.808.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp707.186.932,00	Rp83.413.214,00	Rp790.600.146,00	Rp790.600.146,00	Rp78.208.610
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp19.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.050.000,00	Rp8.050.000,00	Rp16.100.000,00	Rp16.100.000,00	Rp3.220.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp19.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.050.000,00	Rp8.050.000,00	Rp16.100.000,00	Rp16.100.000,00	Rp3.220.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp19.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.050.000,00	Rp8.050.000,00	Rp16.100.000,00	Rp16.100.000,00	Rp3.220.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp849.488.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp699.136.932,00	Rp75.363.214,00	Rp774.500.146,00	Rp774.500.146,00	Rp74.988.610
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp849.488.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp699.136.932,00	Rp75.363.214,00	Rp774.500.146,00	Rp774.500.146,00	Rp74.988.610
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp849.488.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp699.136.932,00	Rp75.363.214,00	Rp774.500.146,00	Rp774.500.146,00	Rp74.988.610
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp927.238.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp404.844.204,00	Rp155.879.686,00	Rp560.723.890,00	Rp640.643.890,00	Rp286.594.480
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp7.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.908.270,00	Rp500.000,00	Rp3.408.270,00	Rp3.408.270,00	Rp3.851.730
5.1	BELANJA OPERASI	Rp7.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.908.270,00	Rp500.000,00	Rp3.408.270,00	Rp3.408.270,00	Rp3.851.730
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.908.270,00	Rp500.000,00	Rp3.408.270,00	Rp3.408.270,00	Rp3.851.730

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp408.270,00	Rp0,00	Rp408.270,00	Rp408.270,00	Rp3.851.730
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp408.270,00	Rp0,00	Rp408.270,00	Rp408.270,00	Rp3.851.730
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	Rp4.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp408.270,00	Rp0,00	Rp408.270,00	Rp408.270,00	Rp3.851.730
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp100.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.117.434,00	Rp5.953.474,00	Rp71.070.908,00	Rp71.070.908,00	Rp29.129.092
5.1	BELANJA OPERASI	Rp100.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.117.434,00	Rp5.953.474,00	Rp71.070.908,00	Rp71.070.908,00	Rp29.129.092
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp100.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.117.434,00	Rp5.953.474,00	Rp71.070.908,00	Rp71.070.908,00	Rp29.129.092
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp100.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.117.434,00	Rp5.953.474,00	Rp71.070.908,00	Rp71.070.908,00	Rp29.129.092
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp100.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.117.434,00	Rp5.953.474,00	Rp71.070.908,00	Rp71.070.908,00	Rp29.129.092
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.097.600,00	Rp315.800,00	Rp2.413.400,00	Rp2.413.400,00	Rp1.786.600
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.060.794,00	Rp4.977.774,00	Rp60.038.568,00	Rp60.038.568,00	Rp23.961.432
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.959.040,00	Rp659.900,00	Rp8.618.940,00	Rp8.618.940,00	Rp3.381.060
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp819.778.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp336.818.500,00	Rp149.426.212,00	Rp486.244.712,00	Rp566.164.712,00	Rp253.613.658
5.1	BELANJA OPERASI	Rp819.778.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp336.818.500,00	Rp149.426.212,00	Rp486.244.712,00	Rp566.164.712,00	Rp253.613.658
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp819.778.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp336.818.500,00	Rp149.426.212,00	Rp486.244.712,00	Rp566.164.712,00	Rp253.613.658
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp509.778.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp178.678.500,00	Rp95.538.682,00	Rp274.217.182,00	Rp354.137.182,00	Rp155.641.188
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp509.778.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp178.678.500,00	Rp95.538.682,00	Rp274.217.182,00	Rp354.137.182,00	Rp155.641.188
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp11.868.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.217.882,00	Rp11.217.882,00	Rp11.217.882,00	Rp650.318
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp190.704.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.239.000,00	Rp27.507.000,00	Rp103.746.000,00	Rp103.746.000,00	Rp86.958.170
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp116.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.602.500,00	Rp18.450.000,00	Rp93.052.500,00	Rp93.052.500,00	Rp23.107.500
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp28.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.895.000,00	Rp19.405.000,00	Rp28.300.000,00	Rp28.300.000,00	Rp400.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.920.000,00	Rp40.080.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp20.646.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.958.800,00	Rp18.958.800,00	Rp18.958.800,00	Rp1.687.200
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Rp21.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.942.000,00	Rp0,00	Rp18.942.000,00	Rp18.942.000,00	Rp2.758.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp293.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.290.000,00	Rp45.481.500,00	Rp195.771.500,00	Rp195.771.500,00	Rp97.228.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp273.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.290.000,00	Rp25.481.500,00	Rp175.771.500,00	Rp175.771.500,00	Rp97.228.500
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp10.900.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.981.500,00	Rp14.981.500,00	Rp14.981.500,00	Rp18.500

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp97.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.000.000,00	Rp4.200.000,00	Rp67.200.000,00	Rp67.200.000,00	Rp30.300.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.200.000,00	Rp4.200.000,00	Rp50.400.000,00	Rp50.400.000,00	Rp14.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.100.000,00	Rp2.100.000,00	Rp25.200.000,00	Rp25.200.000,00	Rp7.300.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp32.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.500.000
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp16.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.490.000,00	Rp0,00	Rp14.490.000,00	Rp14.490.000,00	Rp1.610.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp17.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.850.000,00	Rp8.406.030,00	Rp16.256.030,00	Rp16.256.030,00	Rp743.970
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp17.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.850.000,00	Rp8.406.030,00	Rp16.256.030,00	Rp16.256.030,00	Rp743.970
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp17.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.850.000,00	Rp8.406.030,00	Rp16.256.030,00	Rp16.256.030,00	Rp743.970
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp378.655.794,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.123.349,00	Rp43.495.556,00	Rp157.618.905,00	Rp157.618.905,00	Rp221.036.889
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp309.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.537.049,00	Rp30.154.431,00	Rp124.691.480,00	Rp124.691.480,00	Rp184.368.520
5.1	BELANJA OPERASI	Rp309.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.537.049,00	Rp30.154.431,00	Rp124.691.480,00	Rp124.691.480,00	Rp184.368.520
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp309.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.537.049,00	Rp30.154.431,00	Rp124.691.480,00	Rp124.691.480,00	Rp184.368.520
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp309.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.537.049,00	Rp30.154.431,00	Rp124.691.480,00	Rp124.691.480,00	Rp184.368.520
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp309.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.537.049,00	Rp30.154.431,00	Rp124.691.480,00	Rp124.691.480,00	Rp184.368.520
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp240.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.783.371,00	Rp29.381.533,00	Rp107.164.904,00	Rp107.164.904,00	Rp133.495.096
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp68.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.753.678,00	Rp772.898,00	Rp17.526.576,00	Rp17.526.576,00	Rp50.873.424
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp69.595.794,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.586.300,00	Rp13.341.125,00	Rp32.927.425,00	Rp32.927.425,00	Rp36.668.369
5.1	BELANJA OPERASI	Rp69.595.794,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.586.300,00	Rp13.341.125,00	Rp32.927.425,00	Rp32.927.425,00	Rp36.668.369
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp69.595.794,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.586.300,00	Rp13.341.125,00	Rp32.927.425,00	Rp32.927.425,00	Rp36.668.369
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.495.794,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.638.800,00	Rp5.092.125,00	Rp10.730.925,00	Rp10.730.925,00	Rp3.764.869

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.495.794,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.638.800,00	Rp5.092.125,00	Rp10.730.925,00	Rp10.730.925,00	Rp3.764.869
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp10.630.539,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.251.300,00	Rp5.092.125,00	Rp9.343.425,00	Rp9.343.425,00	Rp1.287.114
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp3.865.255,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.387.500,00	Rp0,00	Rp1.387.500,00	Rp1.387.500,00	Rp2.477.755
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp540.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp90.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp540.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp90.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00	Rp0
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Rp540.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp90.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp54.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.497.500,00	Rp8.159.000,00	Rp21.656.500,00	Rp21.656.500,00	Rp32.903.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp47.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.555.000,00	Rp3.750.000,00	Rp15.305.000,00	Rp15.305.000,00	Rp32.595.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp12.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp510.000,00	Rp3.220.000,00	Rp3.730.000,00	Rp3.730.000,00	Rp8.470.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp21.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.390.000,00	Rp450.000,00	Rp6.840.000,00	Rp6.840.000,00	Rp15.060.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp13.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.655.000,00	Rp80.000,00	Rp4.735.000,00	Rp4.735.000,00	Rp9.065.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp6.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.942.500,00	Rp4.409.000,00	Rp6.351.500,00	Rp6.351.500,00	Rp308.500
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp6.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.942.500,00	Rp4.409.000,00	Rp6.351.500,00	Rp6.351.500,00	Rp308.500
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp3.081.047.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.326.421,00	Rp101.326.421,00	Rp984.172.753,00	Rp280.211.380,00	Rp1.264.384.133,00	Rp1.365.710.554,00	Rp1.715.336.626
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp2.666.004.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.326.421,00	Rp101.326.421,00	Rp856.709.853,00	Rp256.871.380,00	Rp1.113.581.233,00	Rp1.214.907.654,00	Rp1.451.096.526
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp1.062.545.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.326.421,00	Rp101.326.421,00	Rp253.556.025,00	Rp97.303.191,00	Rp350.859.216,00	Rp452.185.637,00	Rp610.360.043
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.062.545.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.326.421,00	Rp101.326.421,00	Rp253.556.025,00	Rp97.303.191,00	Rp350.859.216,00	Rp452.185.637,00	Rp610.360.043
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.062.545.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.326.421,00	Rp101.326.421,00	Rp253.556.025,00	Rp97.303.191,00	Rp350.859.216,00	Rp452.185.637,00	Rp610.360.043
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp73.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.350.000,00	Rp19.450.000,00	Rp46.800.000,00	Rp46.800.000,00	Rp26.410.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp73.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.350.000,00	Rp19.450.000,00	Rp46.800.000,00	Rp46.800.000,00	Rp26.410.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp52.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.800.000,00	Rp9.900.000,00	Rp28.700.000,00	Rp28.700.000,00	Rp23.500.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp21.010.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.550.000,00	Rp9.550.000,00	Rp18.100.000,00	Rp18.100.000,00	Rp2.910.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp989.335.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.326.421,00	Rp101.326.421,00	Rp226.206.025,00	Rp77.853.191,00	Rp304.059.216,00	Rp405.385.637,00	Rp583.950.043
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp989.335.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.326.421,00	Rp101.326.421,00	Rp226.206.025,00	Rp77.853.191,00	Rp304.059.216,00	Rp405.385.637,00	Rp583.950.043

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp712.136.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.326.421,00	Rp101.326.421,00	Rp200.876.025,00	Rp53.073.191,00	Rp253.949.216,00	Rp355.275.637,00	Rp356.860.763
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp277.199.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.330.000,00	Rp24.780.000,00	Rp50.110.000,00	Rp50.110.000,00	Rp227.089.280
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Rp157.146.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.487.350,00	Rp0,00	Rp27.487.350,00	Rp27.487.350,00	Rp129.658.650
5.1	BELANJA OPERASI	Rp157.146.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.487.350,00	Rp0,00	Rp27.487.350,00	Rp27.487.350,00	Rp129.658.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp157.146.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.487.350,00	Rp0,00	Rp27.487.350,00	Rp27.487.350,00	Rp129.658.650
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp139.146.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.487.350,00	Rp0,00	Rp27.487.350,00	Rp27.487.350,00	Rp111.658.650
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp139.146.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.487.350,00	Rp0,00	Rp27.487.350,00	Rp27.487.350,00	Rp111.658.650
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp40.146.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.487.350,00	Rp0,00	Rp27.487.350,00	Rp27.487.350,00	Rp12.658.650
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp99.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.000.000
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Rp379.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.146.650,00	Rp50.763.473,00	Rp192.910.123,00	Rp192.910.123,00	Rp186.499.877
5.1	BELANJA OPERASI	Rp379.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.146.650,00	Rp50.763.473,00	Rp192.910.123,00	Rp192.910.123,00	Rp186.499.877
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp379.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.146.650,00	Rp50.763.473,00	Rp192.910.123,00	Rp192.910.123,00	Rp186.499.877
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.225.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.225.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp525.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp25.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp14.700.000,00	Rp11.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp25.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp14.700.000,00	Rp11.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp9.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.850.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp16.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp14.700.000,00	Rp1.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp346.235.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.446.650,00	Rp50.763.473,00	Rp178.210.123,00	Rp178.210.123,00	Rp168.024.877
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp346.235.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.446.650,00	Rp50.763.473,00	Rp178.210.123,00	Rp178.210.123,00	Rp168.024.877
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp253.735.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.916.650,00	Rp50.763.473,00	Rp146.680.123,00	Rp146.680.123,00	Rp107.054.877

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp92.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.530.000,00	Rp0,00	Rp31.530.000,00	Rp31.530.000,00	Rp60.970.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Rp744.252.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp262.232.678,00	Rp41.106.416,00	Rp303.339.094,00	Rp303.339.094,00	Rp440.912.906
5.1	BELANJA OPERASI	Rp744.252.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp262.232.678,00	Rp41.106.416,00	Rp303.339.094,00	Rp303.339.094,00	Rp440.912.906
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp744.252.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp262.232.678,00	Rp41.106.416,00	Rp303.339.094,00	Rp303.339.094,00	Rp440.912.906
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp89.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.840.000,00	Rp0,00	Rp42.840.000,00	Rp42.840.000,00	Rp46.440.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp89.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.840.000,00	Rp0,00	Rp42.840.000,00	Rp42.840.000,00	Rp46.440.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp8.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp840.000,00	Rp7.440.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp81.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.000.000,00	Rp0,00	Rp42.000.000,00	Rp42.000.000,00	Rp39.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp252.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.800.000,00	Rp3.220.000,00	Rp73.020.000,00	Rp73.020.000,00	Rp179.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp252.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.800.000,00	Rp3.220.000,00	Rp73.020.000,00	Rp73.020.000,00	Rp179.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp232.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.700.000,00	Rp0,00	Rp53.700.000,00	Rp53.700.000,00	Rp179.100.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp19.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.100.000,00	Rp3.220.000,00	Rp19.320.000,00	Rp19.320.000,00	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp402.852.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.592.678,00	Rp37.886.416,00	Rp187.479.094,00	Rp187.479.094,00	Rp215.372.906
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp402.852.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.592.678,00	Rp37.886.416,00	Rp187.479.094,00	Rp187.479.094,00	Rp215.372.906
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp245.352.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.512.678,00	Rp37.886.416,00	Rp156.399.094,00	Rp156.399.094,00	Rp88.952.906
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp157.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.080.000,00	Rp0,00	Rp31.080.000,00	Rp31.080.000,00	Rp126.420.000
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Rp103.847.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.905.200,00	Rp20.268.200,00	Rp66.173.400,00	Rp66.173.400,00	Rp37.674.100
5.1	BELANJA OPERASI	Rp103.847.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.905.200,00	Rp20.268.200,00	Rp66.173.400,00	Rp66.173.400,00	Rp37.674.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp103.847.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.905.200,00	Rp20.268.200,00	Rp66.173.400,00	Rp66.173.400,00	Rp37.674.100
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp280.000,00	Rp5.045.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp280.000,00	Rp5.045.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp280.000,00	Rp20.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.025.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp21.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp5.600.000,00	Rp16.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp21.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp5.600.000,00	Rp16.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp9.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp5.600.000,00	Rp5.600.000,00	Rp4.250.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp12.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp76.572.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.025.200,00	Rp20.268.200,00	Rp60.293.400,00	Rp60.293.400,00	Rp16.279.100

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp76.572.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.025.200,00	Rp20.268.200,00	Rp60.293.400,00	Rp60.293.400,00	Rp16.279.100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp67.822.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.025.200,00	Rp20.268.200,00	Rp60.293.400,00	Rp60.293.400,00	Rp7.529.100
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp8.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.750.000
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp218.803.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.381.950,00	Rp47.430.100,00	Rp172.812.050,00	Rp172.812.050,00	Rp45.990.950
5.1	BELANJA OPERASI	Rp218.803.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.381.950,00	Rp47.430.100,00	Rp172.812.050,00	Rp172.812.050,00	Rp45.990.950
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp218.803.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.381.950,00	Rp47.430.100,00	Rp172.812.050,00	Rp172.812.050,00	Rp45.990.950
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp6.853.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.165.000,00	Rp2.925.000,00	Rp5.090.000,00	Rp5.090.000,00	Rp1.763.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp6.853.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.165.000,00	Rp2.925.000,00	Rp5.090.000,00	Rp5.090.000,00	Rp1.763.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.028.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp740.000,00	Rp288.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.825.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.425.000,00	Rp2.925.000,00	Rp4.350.000,00	Rp4.350.000,00	Rp1.475.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp139.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.370.000,00	Rp24.830.000,00	Rp131.200.000,00	Rp131.200.000,00	Rp8.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp48.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.720.000,00	Rp6.830.000,00	Rp41.550.000,00	Rp41.550.000,00	Rp7.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp34.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.650.000,00	Rp3.200.000,00	Rp28.850.000,00	Rp28.850.000,00	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp14.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.070.000,00	Rp3.630.000,00	Rp12.700.000,00	Rp12.700.000,00	Rp1.400.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp90.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.650.000,00	Rp18.000.000,00	Rp89.650.000,00	Rp89.650.000,00	Rp600.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp90.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.650.000,00	Rp18.000.000,00	Rp89.650.000,00	Rp89.650.000,00	Rp600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp72.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.846.950,00	Rp19.675.100,00	Rp36.522.050,00	Rp36.522.050,00	Rp36.227.950
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp72.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.846.950,00	Rp19.675.100,00	Rp36.522.050,00	Rp36.522.050,00	Rp36.227.950
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp61.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.746.950,00	Rp19.675.100,00	Rp34.422.050,00	Rp34.422.050,00	Rp26.627.950
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp11.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00	Rp9.600.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp415.043.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.462.900,00	Rp23.340.000,00	Rp150.802.900,00	Rp150.802.900,00	Rp264.240.100
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp52.006.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.229.100,00	Rp0,00	Rp15.229.100,00	Rp15.229.100,00	Rp36.776.900
5.1	BELANJA OPERASI	Rp52.006.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.229.100,00	Rp0,00	Rp15.229.100,00	Rp15.229.100,00	Rp36.776.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp52.006.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.229.100,00	Rp0,00	Rp15.229.100,00	Rp15.229.100,00	Rp36.776.900
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp52.006.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.229.100,00	Rp0,00	Rp15.229.100,00	Rp15.229.100,00	Rp36.776.900
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp52.006.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.229.100,00	Rp0,00	Rp15.229.100,00	Rp15.229.100,00	Rp36.776.900
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp17.006.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.429.100,00	Rp0,00	Rp14.429.100,00	Rp14.429.100,00	Rp2.576.900
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp34.200.000
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp363.037.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.233.800,00	Rp23.340.000,00	Rp135.573.800,00	Rp135.573.800,00	Rp227.463.200

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp363.037.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.233.800,00	Rp23.340.000,00	Rp135.573.800,00	Rp135.573.800,00	Rp227.463.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp363.037.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.233.800,00	Rp23.340.000,00	Rp135.573.800,00	Rp135.573.800,00	Rp227.463.200
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp11.367.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp2.520.000,00	Rp8.847.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp11.367.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp2.520.000,00	Rp8.847.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.167.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.167.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp2.520.000,00	Rp7.680.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp60.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.250.000,00	Rp8.050.000,00	Rp23.300.000,00	Rp23.300.000,00	Rp36.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp60.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.250.000,00	Rp8.050.000,00	Rp23.300.000,00	Rp23.300.000,00	Rp36.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp44.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00	Rp36.800.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp16.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.050.000,00	Rp8.050.000,00	Rp16.100.000,00	Rp16.100.000,00	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp291.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.463.800,00	Rp15.290.000,00	Rp109.753.800,00	Rp109.753.800,00	Rp181.816.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp291.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.463.800,00	Rp15.290.000,00	Rp109.753.800,00	Rp109.753.800,00	Rp181.816.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp111.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.393.800,00	Rp0,00	Rp77.393.800,00	Rp77.393.800,00	Rp34.176.200
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.070.000,00	Rp15.290.000,00	Rp32.360.000,00	Rp32.360.000,00	Rp147.640.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp961.806.917,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp386.661.196,00	Rp62.425.675,00	Rp449.086.871,00	Rp449.086.871,00	Rp512.720.046
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp176.527.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.870.890,00	Rp10.785.000,00	Rp31.655.890,00	Rp31.655.890,00	Rp144.871.360
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp61.300.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.530.000,00	Rp3.725.000,00	Rp5.255.000,00	Rp5.255.000,00	Rp56.045.800
5.1	BELANJA OPERASI	Rp61.300.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.530.000,00	Rp3.725.000,00	Rp5.255.000,00	Rp5.255.000,00	Rp56.045.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp61.300.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.530.000,00	Rp3.725.000,00	Rp5.255.000,00	Rp5.255.000,00	Rp56.045.800
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp56.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.530.000,00	Rp3.725.000,00	Rp5.255.000,00	Rp5.255.000,00	Rp51.693.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp56.948.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.530.000,00	Rp3.725.000,00	Rp5.255.000,00	Rp5.255.000,00	Rp51.693.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp14.108.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.108.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp42.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.530.000,00	Rp3.725.000,00	Rp5.255.000,00	Rp5.255.000,00	Rp37.585.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.352.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.352.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.352.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.352.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.352.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.352.800
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp115.226.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.340.890,00	Rp7.060.000,00	Rp26.400.890,00	Rp26.400.890,00	Rp88.825.560
5.1	BELANJA OPERASI	Rp115.226.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.340.890,00	Rp7.060.000,00	Rp26.400.890,00	Rp26.400.890,00	Rp88.825.560

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp115.226.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.340.890,00	Rp7.060.000,00	Rp26.400.890,00	Rp26.400.890,00	Rp88.825.560
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp13.096.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp760.000,00	Rp12.336.450
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp13.096.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp760.000,00	Rp12.336.450
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp896.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp280.000,00	Rp616.450
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp480.000,00	Rp11.720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp25.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp6.300.000,00	Rp19.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp15.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp6.300.000,00	Rp8.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp15.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp6.300.000,00	Rp8.900.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp10.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.200.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp10.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp76.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.280.890,00	Rp7.060.000,00	Rp19.340.890,00	Rp19.340.890,00	Rp57.389.110
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp76.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.280.890,00	Rp7.060.000,00	Rp19.340.890,00	Rp19.340.890,00	Rp57.389.110
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp60.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.280.890,00	Rp7.060.000,00	Rp19.340.890,00	Rp19.340.890,00	Rp40.739.110
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp16.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.650.000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Rp785.279.667,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp365.790.306,00	Rp51.640.675,00	Rp417.430.981,00	Rp417.430.981,00	Rp367.848.686
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.386.400,00	Rp1.600.000,00	Rp35.986.400,00	Rp35.986.400,00	Rp74.013.600
5.1	BELANJA OPERASI	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.386.400,00	Rp1.600.000,00	Rp35.986.400,00	Rp35.986.400,00	Rp74.013.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.386.400,00	Rp1.600.000,00	Rp35.986.400,00	Rp35.986.400,00	Rp74.013.600
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp12.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp8.100.000,00	Rp8.100.000,00	Rp4.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp12.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp8.100.000,00	Rp8.100.000,00	Rp4.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp164.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp12.036.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp8.100.000,00	Rp8.100.000,00	Rp3.936.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.771.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp771.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.771.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp771.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp4.771.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp771.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp93.028.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.286.400,00	Rp1.600.000,00	Rp23.886.400,00	Rp23.886.400,00	Rp69.142.100

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp93.028.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.286.400,00	Rp1.600.000,00	Rp23.886.400,00	Rp23.886.400,00	Rp69.142.100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp73.528.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.286.400,00	Rp0,00	Rp22.286.400,00	Rp22.286.400,00	Rp51.242.100
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp19.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00	Rp17.900.000
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp130.178.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.178.800
5.1	BELANJA OPERASI	Rp130.178.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.178.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp130.178.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.178.800
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.415.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.415.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.415.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.415.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.235.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.235.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.180.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp37.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.620.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp26.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.120.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp11.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp14.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.520.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp9.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.500.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp9.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp82.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.143.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp82.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.143.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp82.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.143.000
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp545.100.867,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.403.906,00	Rp50.040.675,00	Rp381.444.581,00	Rp381.444.581,00	Rp163.656.286
5.1	BELANJA OPERASI	Rp545.100.867,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.403.906,00	Rp50.040.675,00	Rp381.444.581,00	Rp381.444.581,00	Rp163.656.286
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp545.100.867,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.403.906,00	Rp50.040.675,00	Rp381.444.581,00	Rp381.444.581,00	Rp163.656.286
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp33.360.867,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.676.000,00	Rp0,00	Rp31.676.000,00	Rp31.676.000,00	Rp1.684.867
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp33.360.867,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.676.000,00	Rp0,00	Rp31.676.000,00	Rp31.676.000,00	Rp1.684.867
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.310.867,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.744.000,00	Rp0,00	Rp4.744.000,00	Rp4.744.000,00	Rp566.867

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp28.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.932.000,00	Rp0,00	Rp26.932.000,00	Rp26.932.000,00	Rp1.118.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp37.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.400.000,00	Rp1.800.000,00	Rp34.200.000,00	Rp34.200.000,00	Rp2.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp37.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.400.000,00	Rp1.800.000,00	Rp34.200.000,00	Rp34.200.000,00	Rp2.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp37.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.400.000,00	Rp1.800.000,00	Rp34.200.000,00	Rp34.200.000,00	Rp2.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp474.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.327.906,00	Rp48.240.675,00	Rp315.568.581,00	Rp315.568.581,00	Rp159.171.419
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp474.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.327.906,00	Rp48.240.675,00	Rp315.568.581,00	Rp315.568.581,00	Rp159.171.419
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp369.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp261.487.906,00	Rp48.240.675,00	Rp309.728.581,00	Rp309.728.581,00	Rp60.011.419
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.840.000,00	Rp0,00	Rp5.840.000,00	Rp5.840.000,00	Rp99.160.000
JUMLAH		**Rp26.635.536.080,00**	**Rp10.819.478.054,00**	**Rp1.751.289.408,00**	**Rp12.570.767.462,00**	**Rp259.440.000,00**	**Rp604.674.899,00**	**Rp864.114.899,00**	**Rp3.361.917.970,00**	**Rp774.167.631,00**	**Rp4.136.085.601,00**	**Rp17.570.967.962,00**	**Rp9.064.568.118**
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp366.000.000,00	Rp0,00	Rp366.000.000,00	Rp366.000.000,00	Rp0
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.202.301.700,00	Rp593.530.296,00	Rp3.795.831.996,00	Rp3.795.831.996,00	Rp0
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
LS			Rp10.819.478.054,00	Rp1.753.929.408,00	Rp12.573.407.462,00	Rp259.440.000,00	Rp604.674.899,00	Rp864.114.899,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.437.522.361,00	Rp0
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp173.617.217,00	Rp16.374.809,00	Rp189.992.026,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.992.026,00	Rp0
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp135.544,00	Rp0,00	Rp135.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.544,00	Rp0
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp7.689,00	Rp0,00	Rp7.689,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.689,00	Rp0
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp23.066,00	Rp0,00	Rp23.066,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.066,00	Rp0
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp222.253.040,00	Rp36.148.752,00	Rp258.401.792,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp258.401.792,00	Rp0
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp4.911.359,00	Rp472.492,00	Rp5.383.851,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.383.851,00	Rp0
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp14.734.025,00	Rp1.417.467,00	Rp16.151.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.151.492,00	Rp0
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp55.597.193,00	Rp9.037.194,00	Rp64.634.387,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.634.387,00	Rp0
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
16. Taspen			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.893.550,00	Rp0,00	Rp14.893.550,00	Rp14.893.550,00	Rp0
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
22. Jaminan Hari Tua			Rp104.117,00	Rp0,00	Rp104.117,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.117,00	Rp0
Total Potongan			**Rp471.383.250,00**	**Rp63.450.714,00**	**Rp534.833.964,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp14.893.550,00**	**Rp0,00**	**Rp14.893.550,00**	**Rp549.727.514,00**	**Rp0**
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.920.000,00	Rp20.647.000,00	Rp28.567.000,00	Rp0,00	Rp1.981.982,00	Rp1.981.982,00	Rp30.548.982,00	Rp0
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp2.815.500,00	Rp3.895.500,00	Rp2.234.033,00	Rp0,00	Rp2.234.033,00	Rp6.129.533,00	Rp0
3. PPH 21			Rp1.091.311.298,00	Rp368.578.605,00	Rp1.459.889.903,00	Rp0,00	Rp135.000,00	Rp135.000,00	Rp23.244.625,00	Rp6.747.000,00	Rp29.991.625,00	Rp1.490.016.528,00	Rp0
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.078.668,00	Rp400.000,00	Rp3.478.668,00	Rp3.478.668,00	Rp0
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
10. Pajak Penghasilan Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
Total Pajak			**Rp1.091.311.298,00**	**Rp368.578.605,00**	**Rp1.459.889.903,00**	**Rp9.000.000,00**	**Rp23.597.500,00**	**Rp32.597.500,00**	**Rp28.557.326,00**	**Rp9.128.982,00**	**Rp37.686.308,00**	**Rp1.530.173.711,00**	**Rp0**
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			**Rp10.819.478.054,00**	**Rp1.753.929.408,00**	**Rp12.573.407.462,00**	**Rp259.440.000,00**	**Rp604.674.899,00**	**Rp864.114.899,00**	**Rp3.568.301.700,00**	**Rp593.530.296,00**	**Rp4.161.831.996,00**	**Rp17.599.354.357,00**	**Rp0**
- Pengeluaran:													
- SPJ:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.361.917.970,00	Rp775.611.831,00	Rp4.137.529.801,00	Rp4.137.529.801,00	Rp0
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
LS			Rp10.819.478.054,00	Rp1.753.929.408,00	Rp12.573.407.462,00	Rp259.440.000,00	Rp604.674.899,00	Rp864.114.899,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.437.522.361,00	Rp0
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%		Rp173.617.217,00	Rp16.374.809,00	Rp189.992.026,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.992.026,00	Rp0
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		Rp135.544,00	Rp0,00	Rp135.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.544,00	Rp0
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		Rp7.689,00	Rp0,00	Rp7.689,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.689,00	Rp0
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		Rp23.066,00	Rp0,00	Rp23.066,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.066,00	Rp0
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp222.253.040,00	Rp36.148.752,00	Rp258.401.792,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp258.401.792,00	Rp0
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp4.911.359,00	Rp472.492,00	Rp5.383.851,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.383.851,00	Rp0
10. Iuran Jaminan Kematian		Rp14.734.025,00	Rp1.417.467,00	Rp16.151.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.151.492,00	Rp0
11. Iuran Wajib Pegawai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
12. Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp55.597.193,00	Rp9.037.194,00	Rp64.634.387,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.634.387,00	Rp0
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
15. Taperum		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
16. Taspen		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
17. Askes		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
18. Lainnya		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.893.550,00	Rp0,00	Rp14.893.550,00	Rp14.893.550,00	Rp0
19. Sewa Rumah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
20. Beras (BULOG)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
21. Zakat		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
22. Jaminan Hari Tua		Rp104.117,00	Rp0,00	Rp104.117,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.117,00	Rp0
Total Potongan		**Rp471.383.250,00**	**Rp63.450.714,00**	**Rp534.833.964,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp14.893.550,00**	**Rp0,00**	**Rp14.893.550,00**	**Rp549.727.514,00**	**Rp0**
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.920.000,00	Rp20.647.000,00	Rp28.567.000,00	Rp0,00	Rp1.981.982,00	Rp1.981.982,00	Rp30.548.982,00	Rp0	
2. Pajak Penghasilan Ps 22		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp2.815.500,00	Rp3.895.500,00	Rp2.234.033,00	Rp0,00	Rp2.234.033,00	Rp6.129.533,00	Rp0	
3. PPH 21		Rp1.091.311.298,00	Rp368.578.605,00	Rp1.459.889.903,00	Rp0,00	Rp135.000,00	Rp135.000,00	Rp23.244.625,00	Rp6.747.000,00	Rp29.991.625,00	Rp1.490.016.528,00	Rp0	
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0	
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0	
6. Pajak Penghasilan Ps 23		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.078.668,00	Rp400.000,00	Rp3.478.668,00	Rp3.478.668,00	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
10. Pajak Penghasilan Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
Total Pajak			**Rp1.091.311.298,00**	**Rp368.578.605,00**	**Rp1.459.889.903,00**	**Rp9.000.000,00**	**Rp23.597.500,00**	**Rp32.597.500,00**	**Rp28.557.326,00**	**Rp9.128.982,00**	**Rp37.686.308,00**	**Rp1.530.173.711,00**	**Rp0**
- SPJ (Neto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.318.467.094,00	Rp766.482.849,00	Rp4.084.949.943,00	Rp4.084.949.943,00	Rp0
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
LS			Rp9.256.783.506,00	Rp1.321.900.089,00	Rp10.578.683.595,00	Rp250.440.000,00	Rp581.077.399,00	Rp831.517.399,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.410.200.994,00	Rp0
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.746.395,00	Rp25.746.395,00	Rp28.386.395,00	Rp0
Pengembalian ke Kasda (STS KKPD)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
JUMLAH PENGELUARAN			**Rp10.819.478.054,00**	**Rp1.753.929.408,00**	**Rp12.573.407.462,00**	**Rp259.440.000,00**	**Rp604.674.899,00**	**Rp864.114.899,00**	**Rp3.361.917.970,00**	**Rp775.611.831,00**	**Rp4.137.529.801,00**	**Rp17.575.052.162,00**	**Rp0**
Saldo Kas UP/GU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp206.383.730,00	Rp206.383.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp206.383.730,00	Rp206.383.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

Diyanto, SE, MT
NIP. 197110132005011005

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

Sumiati, SE
NIP. 198011302007012006